

PROCEEDING

**Temu Ilmiah Nasional Psikologi
Peran Psikologi dalam Pluralisme
Masyarakat Indonesia**

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA

Prof. Soetandyo Wignjosebroto, MPA

Dr. Haryatmoko

Kamis, 24 November 2011

Fakultas Psikologi Universitas Airlangga

ISBN 978-979-25-3479-5

imagining
learning
creating

CHANGE for
a BETTER
Life

UB

INSAN
JURNAL PSIKOLOGI

Scripta

Proceedings Temu Ilmiah Nasional Psikologi

Peran Psikologi dalam Pluralisme Masyarakat di Indonesia

Prolog

Ilham Nur Alfian

Keynote Speaker

Haryatmoko

Soetandyo Wignjosoebroto

Penyelaras Akhir

Ilham Nur Alfian

Cetakan Pertama

November 2011

Penerbit

Fakultas Psikologi Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya

Telp. (031) 5032770, 5014460, Fax. (031) 5025910

e-mail: fpsi@unair.ac.id

ISBN

978-979-25-3479-5

Pengantar	iii
Daftar Isi	v
1. Menerima Pluralitas: Masalah Habitus dan Keterbukaan terhadap Liyan Haryatmoko	1
2. Wacana Pluralisme dalam Kehidupan Nasional Soetandyo Wignjosoebroto	16
3. Mendongeng sebagai Alternatif Metode Pembelajaran tentang Pluralisme Masyarakat Indonesia pada Anak Usia Dini Yudho Bawono	22
4. Penanaman Nilai Lintas Budaya melalui Cerita Rakyat Rudi Cahyono	26
5. Mengajarkan Budaya Pluralisme pada Anak melalui Permainan Tradisional Eveline Sarintohe dan Missiliana R.	33
6. Kelurahan Pegirian Menuju Kampung Ramah Anak: (Studi Tentang Peran Kelompok Anak Dalam Pembentukan <i>Resilience</i> Anak terhadap Pengaruh Negatif Lingkungan) G. Edwi Nugrohadi, F. Dessi Christanti, dan Sylvia K. Ngonde	39
7. Masyarakat Plural Indonesia: Penerimaan Kaum LGBTiQ sebagai Manusia Seutuhnya Wahyu Tri Muryani, Fima H., Dita D., Nita R., Sakina D. K.	50
8. <i>The Muhammad's Prophetic Leadership</i> : Teropong Kepemimpinan Islami sebagai Visi Kepemimpinan Nasional Muhammad Ghazali Bagus Ani Putra	56
9. Islam Menolak/Menerima Pluralisme: Perbedaan Makna Islam sebagai Rohmatan lil Alamin Antara Abu Bakar Baasyir dan Hasyim Mujadi M. Iqbal dan Tutut Chusniyah	71

10. Ancaman Ideologi Islam Radikal terhadap Pluralisme Masyarakat Indonesia:
Perspektif Kebutuhan Psikologi
Tutut Chusniyah 77
11. Pembiaran Prasangka pada Masyarakat Rawan Konflik
Nina Zulida Situmorang dan Urip Wahyudin 84 ✓
12. Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Kecemasan Berbicara
Di Depan Umum pada Mahasiswa
Dioda Arishinta 88
13. Penerapan Pembelajaran dengan Menggunakan Metode *Problem Solving* pada
Materi Sistem Pencernaan Makanan Di Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Krian
Sih Wahyuni Raharjeng 97
14. Efektifitas Penerapan Outbound Training sebagai *Experiential Learning*
dalam Meningkatkan Kemampuan Resolusi Konflik Interpersonal pada Remaja
Hetti Sari Ramadhani 105
15. Studi Komperatif Prestasi Belajar antara Siswa Di SDN Sukorejo I yang
Menggunakan Sistem Guru Mata Pelajaran dengan Siswa Di SDN Kepuhrejo
yang Menggunakan Sistem Guru Kelas
Ertiana 131
16. Peran Psikologi Transpersonal dalam Mengintegrasikan Psikoterapi
di Indonesia
Nur Aziz Afandi, Nosan Feri, dan Hendro Prabowo 136
17. Peranan E-Konseling dalam Membantu Klien
Hamidah 142
18. Coping Strategy dan Adaptational Outcomes pada Petugas Regu
Pengamanan di Rutan X Bandung
Dewi Sartika, Siti Qodariah, dan Noniek Liliantini 159
19. Profil *Cattel's Sixteen Personality Factor* pada Atlet PELATDA Panjat Tebing
Buatan Jawa Barat
Siti Qodariah, Dewi Sartika, Yatni Pratiningsih 167
20. Kearifan Lokal Budaya Sunda dalam Mengajarkan Perilaku Membuang
Sampah di Lingkungan Perkotaan
Missiliana R. dan Eveline Sarintohe 174

21. Multikulturalisme di Kelas Internasional dan Hubungannya dengan Motivasi untuk Terus Berprestasi dan Menonjolkan Keunggulan diantara Kelompok Lainnya Septiadhi W., Amiruddin R.S., dan Eduard Wherry H.S.	183
22. Aktivitas Pembelajaran Eksperiensial untuk Mengelola Prasangka: Sebuah Studi Aksi pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi Muslihati	191
23. Internalisasi Konsep Pendidikan Humanis Melalui Aplikasi di Ranah Keluarga untuk Mewujudkan Generasi Toleran Ditengah Pluralitas Masyarakat Indonesia Asri Diana Kamilin	206
24. Peran Psikologi Dalam Memahami Perkawinan Etnis Cina dan Etnis Sunda Eni Nuraeni Nugrahawati	213
25. Relasi Antara Etnis Cina dan Etnis Jawa Berdasarkan Stereotip dan Jarak Sosial Budi Susetyo	220
26. Psikologi dalam pluralisme Rajif Jihan Muflihun, Wahyu Widodo, dan Novan Adwiasa	235
27. Transformasi Stereotipe Melalui Media untuk Persatuan Indonesia yang Plural Renita Putri Maharani	239
28. Membangun Ikatan Saling Berbagi Identitas dalam Kemajemukan Masyarakat Indonesia Rayini Dahesihsari, Juliana Murniati, Hoshael W. Erlan	245
29. Perilaku Prososial dalam Kemajemukan Indonesia: Sebuah Kajian Psikologi untuk Perubahan Sosial Intan Rahmawati	252
30. Kajian Psikologi Sosial Terapan Terhadap Masalah-Masalah Hubungan Antar Kelompok Budaya Di Indonesia Fattah Hanurawan	258
31. Antara Multikulturalisme dan <i>Colour-blind</i> : Mencari Pola Pluralisme Indonesia Ardiningtiyas Pitaloka	265
32. Kaji Ulang Konsep Modal Sosial dalam Masyarakat Pluralis Nina Zulida Situmorang	285

33. Motivasi Menjadi Pengemis (Studi Kasus Terhadap Pengemis di Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan)
Alfan Arifuddin
34. Benarkah KB Menjamin Tercapainya Kesejahteraan Sosial?
Willa Follona dan Ria Savitri
35. Nilai-Nilai *Entrepreneur Small Medium Enterprises*: Studi Perbandingan pada Warung Tegal dan Warung Padang dengan Telaah Nilai Berdasarkan Teori Schwartz
Ayu Dwi Nindyati
36. Eksistensi *Superstitious Belief* dalam *Consumer Buying Behavior*: Studi pada Pelaku Jual-beli Rumah/Pekarangan di Yogyakarta
Amri Hana Muhammad
37. Pluralisme dan Konsep Tentang Diri Jamak
Achmad Chusairi
38. Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Anak dan Remaja: Sebuah Kajian Teoritis atas Perkembangan Psikopatologi dalam Ruang Lingkup KDRT
Margaretha

KAJI ULANG KONSEP MODAL SOSIAL DALAM MASYARAKAT PLURALIS

Nina Zulida Situmorang
Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, Jakarta
Email: ninasitumorang@yahoo.com

Abstrak

Indonesia memiliki lebih kurang 600 suku bangsa dengan identitas dan kebudayaan yang berbeda sehingga dikenal dengan masyarakat multikultural dan pluralitas suku bangsa yang mendiami beribu pulau. Sebagai masyarakat komunal yang mempunyai nilai-nilai yang mendukung pengembangan budaya, konflik berdarah antar kelompok yang bernuansa kesukuan dan agama acap terjadi dan menimbulkan korban yang tidak sedikit. Modal sosial menjadi salah satu alternatif dalam memberikan pencerahan tentang makna kepercayaan, kebersamaan dan toleransi. Menurut Putnam (1993), modal sosial didefinisikan sebagai suatu nilai mutual trust (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Pilarnya adalah jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Diperlukan suatu jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas yang memberi hasil yang diinginkan maupun hasil yang tidak diinginkan (Putnam, 1993). Jaringan ini terbentuk atas kesamaan suku atau daerah, agama, politik dan lain-lain. Terwujudnya konsep modal sosial dalam realitas masyarakat akan memberikan kekuatan untuk mewujudkan demokrasi.

Kata kunci : modal sosial, masyarakat, pluralis

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang terletak di khatulistiwa dengan potensi kekayaan sumber daya alam melimpah mulai dari kekayaan laut, hutan, hingga barang tambang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, di samping letaknya yang strategis secara geografis. Sumber daya alam tersebut Alam Indonesia yang kaya-raya dan dirawat dengan baik oleh nenek moyang kita juga menjadi salah satu faktor yang membuat kepulauan nusantara menjadi sumber perhatian dunia. Selain itu Indonesia memiliki lebih kurang 17.600 pulau dengan 'hanya' 6.000 pulau yang berpenghuni. Setiap pulau terdiri dari suku-suku yang berjumlah sekitar 600 suku bangsa dengan identitas dan kebudayaan yang berbeda. Keanekaragaman Bangsa Indonesia yang terserap dalam tatanan sosial, agama dan suku bangsa, telah ada sejak zaman dahulu yang merupakan kekayaan dalam khasanah budaya. Kemajemukan bangsa atau pluralisme bangsa ini sesungguhnya dapat dipandang sebagai suatu berkah karena menjadi potensi dan sumber kekuatan jika dapat dikembangkan ke arah percepatan pencapaian kesejahteraan dan persatuan masyarakat.

Fakta berbicara lain, potensi tersebut pada era reformasi bukan menjadi modal bangsa, bahkan menjadi sumber perselisihan dan memicu perpecahan bangsa. Karena itu penting bagi bangsa Indonesia pada era reformasi yang muncul

sejak tahun 1998 yang ingin mewujudkan citacita membangun Indonesia Baru dalam suatu "masyarakat multikultural Indonesia" yang bercorak "masyarakat majemuk" (Suparlan, 2002). Potensi atau modal tersebut yang dalam makalah ini disebut dengan modal sosial.

Modal sosial merupakan salah satu elemen yang terkandung dalam masyarakat, berbentuk nilai dan norma yang dipercayai dan dijalankan oleh sebagian besar anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup individu dan keberlangsungan komunitas masyarakat. Konsep modal sosial (*social capital*) awalnya dipopulerkan oleh Robert Putnam (1993) setelah menulis artikel hasil penelitiannya di Italia tahun 1985 diikuti oleh Francis Fukuyama (1995, 2000) dan setelah itu semakin banyak dijadikan pembahasan dan penelitian. Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial sebagai institusi sosial melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. Fukuyama (1997) mendefinisikan modal sosial adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalannya kerjasama di antara mereka. Secara umum munculnya perhatian pada topik tersebut karena lemahnya jalinan sosial masyarakat dan hubungan yang tidak harmonis antar individu. Jika konsep definisi ditelusuri dan dipahami konsep modal sosial bukanlah suatu keniscayaan dalam bangsa Indonesia karena konsep tersebut bukan sekedar *value* atau falsafah bangsa namun sudah terejawantahkan dalam perilaku masyarakat sehari-hari sejak zaman dahulu. Hal tersebut yang membuat perlunya kaji (ulang) konsep modal sosial dalam kondisi kekinian dan model terapan yang digunakan.

II. Metode

Makalah ini menggunakan metode kajian teoritik berdasar data-data dan literatur bersumber jurnal-jurnal penelitian, buku dan makalah lainnya. Berdasarkan penelusuran dengan konsep modal sosial dapat digunakan dalam penelitian dengan tema sama.

III. Bahasan

Dua tokoh utama Putnam dan Fukuyama yang mengembangkan konsep modal sosial memberikan definisi yang penting. Meskipun berbeda dalam pendekatan konsep namun keduanya memiliki kaitan erat (Spellerberg, 1997) terutama menyangkut konsep *trust* (kepercayaan). Putnam mengartikan modal sosial sebagai penampilan organisasi sosial seperti jaringan-jaringan dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Putnam menegaskan bahwa modal sosial terkait dengan organisasi sosial, ikatan atau hubungan sosial, norma dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Sedangkan Fukuyama menjelaskan modal sosial sebagai kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan dalam sebuah komunitas. Menurut Fukuyama kepercayaan adalah harapan yang muncul di dalam komunitas yang berperilaku jujur, dan bekerja sama secara reguler, yang didasarkan pada norma-norma bersama di antara anggota komunitas (Fukuyama,

1995). Dari sudut pandang psikologi, pendapat Fukuyama Dari sudut pandang psikologi, pendapat oleh kelompok teori kepribadian (*traits theorist*) yang melihat bahwa munculnya suatu kelompok kerja yang kohesif baru akan terjadi kalau individu memiliki sifat kepribadian tertentu yang mendukung interaksi sosial. Artinya modal sosial sebagai sesuatu *traits* (sifat) yang melekat (*embedded*) pada diri individu yang berupa tata nilai kehidupan dan aturan yang dianut dan dijalankan oleh individu yang memfasilitasi kerjasama yang baik (Ancok, 2003).

Untuk memahami secara sederhana dan sistematis tentang modal sosial dapat dibuat bagan tipologi modal sosial berdasar beberapa literatur (Eko, 2003) yang paralel dengan prinsip demokrasi, yang diletakkan dalam konteks hubungan sosial vertikal (pemerintah dan rakyat) dan hubungan sosial horizontal (antar warga atau antar kelompok masyarakat). Modal sosial adalah basis yang inheren dalam demokrasi, baik dalam konteks hubungan vertikal (rakyat dan pemerintah atau pemimpin dengan yang dipimpin) serta hubungan horizontal (antar warga atau antar komunitas dalam masyarakat).

Bagan 1
Tipologi modal sosial
dalam konteks demokrasi

	Vertikal (pemerintah dan rakyat)	Horizontal (antarwarga)
Struktural (hubungan dan organisasi)	DPRD Forum warga Rakorbang	Paguyuban Asosiasi Organisasi lokal Jaringan sosial
Kognitif (norma dan nilai)	Kepercayaan Akuntabilitas Kemitraan Partisipasi Responsivitas	Solidaritas Toleransi Kepercayaan Kerjasama

Sumber: Diadaptasi dan dimodifikasi dari Coleman (1988, 1990), Putnam (1993, 2000), North (1990), Bain dan Hicks (1998), Uphoff (2000), Colleta dan Cullen (2001).

Bagan di atas bisa dijabarkan menjadi dua pemahaman besar tentang relevansi antara modal sosial dan demokrasi lokal. Secara horizontal, berbagai organisasi dan jaringan sosial merupakan arena bagi masyarakat sipil untuk membangun solidaritas, toleransi, kepercayaan dan kerjasama, atau yang sering disebut pluralisme. Apa yang mungkin disebut aliran pemikiran 'kepercayaan dan jaringan kerja sosial' mempunyai sejarah intelektual yang berbeda dan sangat panjang sebagai sebuah upaya untuk memecahkan salah satu persoalan klasik ilmu sosial: yaitu, bagaimana dan mengapa beberapa masyarakat, khususnya masyarakat skala besar modern, memelihara tingkat kesatuan sosial dan stabilitas politik ketika konflik sosial dan ketidakpuasan politik yang serius mungkin mudah mengancam mereka (Eko, 2003).

Secara vertikal berbagai organisasi dan jaringan lokal menjadi tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun kepercayaan.

akuntabilitas, kemitraan, responsivitas dan partisipasi. Secara teoretis masyarakat yang didirikan dengan baik dengan keberagaman dan jumlah jaringan kerja sosial yang luas dan besar adalah perlu untuk melaggengkan kebajikan warga negara yang diperlukan untuk pemerintahan yang demokratis. Bagi banyak teoritis, organisasi sukarela adalah bentuk jaringan kerja sosial yang krusial dan kepercayaan antara warga negara dan pemimpin politik mereka. Kepercayaan bukan hanya merupakan konsep yang dipertentangkannya sendiri, tetapi ia mempunyai banyak sinonim dan istilah yang berhubungan erat tetapi tidak identik dengan kebersamaan, empati, resiprositas, kesopanan, rasa hormat, solidaritas, toleransi, dan persaudaraan (Eko, 2003).

Ada tiga komponen kapital sosial menurut Putnam (1993) yang dikaitkan dengan kapital sosial dengan lembaga sosial yaitu jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan sosial (Field, 2003; Coleman, 1988; Fukuyama, 1997; Lin, 2001, 2004).

a. Jaringan Sosial

Jaringan-jaringan kerjasama antar manusia terwujud dari infrastruktur dinamis dari modal sosial yang memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi yang memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat akan memiliki jaringan sosial yang kokoh pula yang dapat memperkuat perasaan kerjasama anggotanya dan mendapat manfaat dari partisipasinya (Putnam, 1995).

b. Norma-norma

Norma-norma terdiri dari pemahaman, nilai, harapan dan tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat terbentuk dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti kode etik yang berupa pra-kondisi ataupun produk dari kepercayaan sosial.

c. Kepercayaan

Kepercayaan adalah harapan yang tumbuh dalam suatu masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama (Fukuyama, 1995). Kepercayaan sosial yang tinggi dalam masyarakat cenderung memiliki aturan-aturan sosial bersifat positif dan pada akhirnya terbentuk hubungan-hubungan kerjasama yang baik pula (Cox, 1995).

Tetapi modal sosial yang kian semarak memunculkan banyak sisi paradoksal atau modal sosial negatif. Secara horizontal kemajemukan masyarakat menyajikan konflik ketimbang pluralisme dan kohesivitas. Ruang publik memang menghadirkan wacana dan gerakan demokratisasi yang semarak, tetapi polarisasi ideologis dan kepentingan muncul jauh lebih menonjol. Maraknya praktik kolusi-nepotisme dan berbagai bentuk praktik mafia terlihat dari gejala naiknya peringkat praktik korupsi dan berkibarnya politisi busuk. Dalam era reformasi ini, peran dominan birokrat agak tergeser oleh para wakil rakyat yang menunjukkan betapa kuatnya modal sosial negatif tersebut sehingga mampu menjalarkan pengetahuan korupsi dalam waktu singkat. Tradisi arisan yang prinsip awalnya menjalin hubungan antaranggota sambil menggilir dana yang dapat meringankan beban seorang anggotanya menjadi sarana pamer kekayaan. Budaya gotong royong kebersihan kampung yang dulunya dilakukan spontan oleh masyarakat melenceng menjadi gotong royong untuk kompetisi yang dipaksakan kepala desa dalam rangka menyambut kunjungan pejabat tinggi.

III. Kesimpulan dan Saran

Modal sosial sebagai sebuah konsep bukanlah sesuatu yang baru dalam tataran hidup bangsa Indonesia. Pilar modal sosial yaitu jaringan sosial, norma-norma dan kepercayaan menjadi perekat antar individu dalam membangun hubungan sesama. Hal ini tampaknya yang menghilang dalam perilaku bermasyarakat kita yang menjadi pemicu salah satu munculnya konflik di berbagai daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ancok, D. (2003). *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta.
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, Vol. 94: 95-120.
- Cox, E. (1995). Background Material and Boyer Lecture (<http://www.leta.edu.au/coxp.htm>). Diunduh tanggal 20 Oktober 2011.
- Eko, S. (2003) Modal sosial, Desentralisasi dan Demokrasi lokal. Makalah disajikan dalam Seminar Internasional IV "Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Demokrasi dan Partisipasi", Salatiga.
- Field, J. (2003). *Social Capital*. London dan New York: Routledge.
- Fukuyama, F. (1995) *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: A Free Press Paperbacks Book.
- Fukuyama, F. (1997). Social capital and the modern capitalist economy: Creating a high trust workplace. *Stern Business Magazine*, Vol 4. no 1.
- Fukuyama, F. (2000). *The Great Depression: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. London: Profile Book.
- Lin, N. (2001). *Social Capital. A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lin, N. (2004). *Social Capital*. Di dalam *The Encyclopedia of Economic Sociology* Jens Beckert and Milan Zagiroski. London: Rutledge. (<http://sociology.nccu.edu.tw/Chinese/speech/paper-final.pdf>). Diunduh tanggal 15 Oktober 2011.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Putnam, R. (1993b). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *American Prospect*. Spring.
- Putnam, (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*, 6:65-78.
- Spellerberg, A. (1997). *Towards a Framework for the Measurement of social Capital* dalam David, R. (ed), *Social Capital and Policy Development*, Wellington: The Institute of Policy Studies.
- Suparlan, P. (2002). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Antropologi Indonesia*, Vol 69